



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka membantu Gubernur dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Inspektorat serta Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kabupaten, Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b Inspektorat Provinsi perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang..../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Nomor 1032;
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan audit, rivi, monitoring, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai standar dan kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan tim pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Gubernur dan/atau Surat Perintah Inspektur atas nama Gubernur berdasarkan Standar Audit dan Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilaksanakan berdasarkan unsur-unsur Pengawasan sebagai berikut :
- a. Surat Perintah
 - b. Program Kerja Audit

c. Kertas Kerja Audit..../4

- c. Kertas Kerja Audit/Reviu dan/atau sebutan lainnya
- d. Naskah Hasil Pengawasan
- e. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
- f. Tindak Lanjut LHP
- g. Perhitungan Kerugian Negara/Daerah
- h. Saksi Ahli dalam Persidangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah dan Penyalahgunaan wewenang dan Perbuatan melawan Hukum lainnya.

- KELIMA : Unsur-unsur kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan berdasarkan Standar dan Kode Etik APIP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberikan biaya tambahan sesuai ketentuan yang diatur secara teknis oleh Kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surat terhitung bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH.,MH
NIP.19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 89 TAHUN 2024
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Keterangan
				RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)						(7)	(8)	(9)	(10)
1	Reviu RKPD 2025	Reviu	Pemprov Papua Tengah	Juni	Juni	2	4	6	10	70	92	27,183,250,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
2	Reviu RKPD Perubahan 2025	Reviu	Pemprov Papua Tengah	Agustus	Agustus	2	4	6	10	70	92	27,183,250.00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
3	Reviu RKA-SKPD T.A.2025	Reviu	22 OPD	Agustus	Agustus	22	44	66	110	240	482	300,753,750.00	22 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
4	Reviu RKA-SKPD Perubahan T.A 2024	Reviu	22 OPD	Oktober	Oktober	22	44	66	110	240	482	300,753,750.00	22 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
5	Reviu Renja-SKPD Perubahan 2025	Reviu	22 OPD	Juli	Juli	22	44	66	110	240	482	300,753,750.00	22 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
6	Reviu Renja-SKPD Perubahan 2024	Reviu	22 OPD	Agustus	Agustus	22	44	66	110	240	482	300,753,750.00	22 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
7	Reviu KUA & PPAS 2025	Reviu	Pemprov Papua Tengah	Juli	Juli	2	4	6	10	70	92	27,183,250,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
8	Reviu Renja-SKPD Perubahan 2025	Reviu	Pemprov Papua Tengah	Juli	Juli	2	4	6	10	70	92	27,183,250,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
9	Reviu LKPD 2023	Reviu	Pemprov Papua Tengah	Januari	Januari	4	6	10	20	200	240	26,093,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
10	Reviu SSH, ASB, 2025	Reviu	Pemprov Papua Tengah	Oktober	Oktober	2	4	6	10	70	92	85,482,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
11	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Reviu	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	April	April	4	6	10	16	128	164	52,471,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
12	Probity Audit	Audit	Dinas PUPR (Program Penyelenggaraan Jalan (3 Paket Pekerjaan)	Agustus	Agustus	6	15	21	45	135	222	307,533,000,00	3 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
13	Reviu LPPD 2023	Reviu	Pemprov Papua Tengah	April	April	22	44	66	110	240	480	645,778,000,00	22 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
14	Reviu Laporan Kinerja (LAKIP)	Reviu	Pemprov Papua Tengah	April	April	22	44	66	110	240	482	635,778,000,00	22 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023

15	Pemeriksaan Investigatif (ATT)/Permintaan Gubernur	Audit	Pengaduan Masyarakat/ permintaan APH/permintaan Gubernur	Januari	Desember	10	15	25	50	250	350	314,217,000,00	5 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
16	Audit Ketaatan	Audit	Dinas Pendidikan (Program Pengelolaan Pendidikan)(2 Kegiatan)	Juni	Juni	4	10	14	30	210	268	115,,450,500,00	2 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
17	Audit Kinerja	Audit	3 OPD (2 Kegiatan)	Mei	Mei	4	10	14	30	150	208	170,949,000,00	2 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
18	Audit PBJ	Audit	1 OPD (3 Paket Pekerjaan)	September	September	6	15	21	45	135	222	169,401,000,00	3 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
19	Reviu Dana Hibah dan Bansos	Reviu	Dinas Sosial	Oktober	Oktober	1	2	3	5	50	61	84,700,500,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
20	Reviu Kegiatan DAK Fisik	Reviu	OPD (Tahap I)	Juli	Juli	2	4	6	10	70	92	27,783,500,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
21	Reviu Kegiatan DAK Fisik	Reviu	OPD (Tahap II)	Oktober	Oktober	2	4	6	10	70	92	27,783,500,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
22	Reviu Kegiatan DAK Fisik	Reviu	OPD (Tahap III)	Desember	Desember	2	4	6	10	70	92	27,783,500,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
23	Reviu Dana Otsus dan DTI	Reviu	Pemprov Papua Tengah (Tahap 1)	Mei	Mei	2	4	6	10	70	92	57,143,500,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
24	Reviu Dana Otsus dan DTI	Reviu	Pemprov Papua Tengah (Tahap 1)	September	September	2	4	6	10	70	92	57,143,500,01	2 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
25	Reviu Dana Otsus dan DTI		Pemprov Papua Tengah (Tahap 1)	Desember	Desember	2	4	6	10	70	92	57,143,500,02	3 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
26	Monitoring I Monitoring	Monitoring	Pemprov Papua Tengah (Semester 1)	Juli	Juli	1	2	3	5	25	36	53,862,500,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
27	Monitoring Penyerapan APBD	Monitoring	Pemprov Papua Tengah (Semester 2)	Desember	Desember	1	2	3	5	25	36	53,862,500,01	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
28	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Assessment	Pemprov Papua Tengah	Maret	Maret	2	4	6	10	70	92	30,643,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
29	Monitoring Pelaporan LHKPN	Monitoring	Pemprov Papua Tengah	Maret	Maret	2	4	6	10	70	92	93,479,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
30	Operasionalisasi Tim Saber Pungli	Monitoring dan Sosialisasi	Pemprov Papua Tengah	Januari	Desember	2	4	6	10	50	72	52,424,500,00	2 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
31	Monitoring MCP KPK	Monitoring	Pemprov Papua Tengah	Januari	Desember	2	4	6	10	70	92	198,646,500,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
32	Penilaian SPI KPK	Assessment	Pemprov Papua Tengah	Januari	Desember	2	4	6	P	70	92	78,810,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
33	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Pemprov Papua Tengah (Semester 1)	Juli	Juli	2	3	5	5	35	50	18,474,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023

34	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Pemprov Papua Tengah (Semester 2)	Desember	Desember	2	3	5	5	35	50	18,474,000,01	2 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
35	Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis TPTGR	Monitoring	Pemprov Papua Tengah	November	November	4	6	10	10	70	100	300,000,000,00	2 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
36	Rviu SPJ T.A. 2024 (22 OPD)	Reviu	22 OPD (Semester 1)	Juli	Juli	22	44	66	110	240	482	396,874,500,00	22 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2023
37	Rviu SPJ T.A. 2024 (22 OPD)	Reviu	23 OPD (Semester 2)	Desember	Desember	22	44	66	110	240	482	396,874,500,01	22 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2024
38	Penilaian Kapabilitas APIP	Assestment	Inspektorat	Januari	November	2	4	6	10	70	92	93,479,000,00	2 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2025
39	Monev Otsus	Monev	Kabupaten Mimika	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	114,957,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2026
40	Monev Otsus	Monev	Kabupaten Dogiyai	September	September	3	4	6	10	60	83	94,957,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2027
41	Monev Otsus	Monev	Kabupaten Intan Jaya	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	178,957,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2028
42	Monev Otsus	Monev	Kabupaten Deiyai	September	September	3	4	6	10	60	83	97,957,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2029
43	Monev Otsus	Monev	Kabupaten Nabire	September	September	3	4	6	10	60	83	22,099,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2030
44	Monev Otsus	Monev	Kabupaten Puncak Jaya	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	178,957,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2031
45	Monev Otsus	Monev	Kabupaten Paniai	September	September	3	4	6	10	60	83	100,957,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2032
46	Monev Otsus	Monev	Kabupaten Puncak Jaya	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	178,957,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2033
47	Monitoring Survei Penilaian Integritas	Monitoring	Pemprov Papua Tengah	September	September	2	4	6	10	70	92	67,500,000,00	1 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2035
48	Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Assestment	Pemprov Papua Tengah	Januari	November	2	4	6	10	70	92	19,062,000,00	2 LAP	Laptop, ATK	PMK 119 2036

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH.,MH
NIP.19760608 200212 1 002